

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. (2008). *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alwi Hasan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- C.Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyad (2008). *Criminal policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni.
- M. Arifin. (2008). *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Petrus Irwan Pandjaitan & Chairijah. (2009). *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta: Indhill CO.

Prasetyo Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Seorjono Soekanto, (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: IU Press.

Soerjono Soekanto, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: IU Press.

Zuhairini, dkk. (1994), *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

C. JURNAL

Farlu Mervy Wongkar, 2019 “*Pembebasan Bersyarat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*”. *Lex Et Societatis* Vol.7, No.6, Hal. 18-24. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25799>

D. SKRIPSI

Andi M. Erwin Febrian, (2016). *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana menurut UU NO.12 Tahun 1995*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/4810>

Indri Dea Nanda, “*Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/19567>

Sisi Maulida, (2021). *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Masa Covid-19*. (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19477>

YP Sari, (2020). *Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur). <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/1008>

E. LAIN-LAIN

Wawancara dengan Staf Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 14 Oktober 2022.

Wawancara dengan Staf Register di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 14 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 14 Oktober 2022